

BAB II

KERJASAMA SISTER PROVINCE PEMPROV NTB

Bab ini menggambarkan Kerjasama Internasional dalam Bentuk *Sister Province* yang dibangun Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT.

A. Dinamika Pemerintah Provinsi NTB

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya provinsi NTB berlansung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi negara bagian Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari provinsi sunda kecil setelah pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah beberapa kali mengalami proses perubahan ketatanegaraan paska di proklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan mejadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II di bentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintah berjalan berdasarkan undang-

undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika pemerintah daerah Lombok dan Sumabawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi menandai terbentuknya provinsi NTB. Zaman terus berganti, kosolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang belum mengembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Djakraningrat di gantikan oleh HR. Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (Pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 HR. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Suherman sebagai Gubernur provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian di mantapkan dan provinsi NTB yang di kenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 H. Warsito terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Suherman. H. Warsito mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua priode, sebelum di gantikan H. Harun Al Rasyid pada Tanggal 31 Agustus 1998.

Harun Al Rasyid berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program gema prima. Tahun 2003 hingg 1 september 2008 Lalu Serinata dan Wakil Gubernur Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang dan sektor. Do zaman ini, sejumlah

program di luncurkan seperti gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah mulai terealisasi dan di tergetkan rampung di pertengahan 2009.

Dalam usianya yang ke-52 provinsi NTB kini dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya yaitu Gubernur Zainul Majdi dan wakil Gubernur Badrun Munir. Pada tahun 2010, kedua pasangan pemimpin mengenakan dua tahun pemerintahanya di provinsi NTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang beriman dan berdaya saing.

Gambar 1.

Logo/Lambang Provinsi Nusa Tenggara Barat



Pengertian Logo Provinsi NTB¹ :

1. Rantai yang terdiri dari 4 berbentuk bundar dan yang 5 berbentuk segi empat, melambangkan tahun 45 (1945)
2. Padi dan kapas. Butiran padi sebanyak 58 butir, dan daun kapas sebanyak 17 dan bunga kapas sebanyak 12 kuntuk yang semuanya melambangkan tanggal 17 Desember 1958 yaitu berdirinya Provinsi NTB
3. Bintang segi lima yang melambangkan 5 sila dari pancasila
4. Gunung yang berasap menunjukkan Gunung Rinjani, gunung berapi yang tertinggi di pulau Lombok.
5. Kubah melambangkan penduduk Provinsi NTB yang taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah agamanya.
6. Kijang melambangkan binatang khas yang banyak terdapat di Pulau Sumbawa
7. Tulisan berbunyi: NTB, ialah nama Daerah yang berpemerintahan sendiri yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Makna warna dalam Logo Provinsi NTB :

1. Biru : Kesetiaan, Daerah Provinsi NTB adalah Daerah yang selalu setia pada perjuangan Bangsa Indonesia
2. Hijau : Kemakmuran, kemakmuran adalah cita-cita kita semua dan juga tanda kesuburan dari Daerah Provinsi NTB.
3. Putih : Kesucian, Keluhuran rakyat Provinsi NTB yang senantiasa taat betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

¹ Sejarah terbentuknya provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam <http://www.ntbprov.go.id/hal-sejarah-nusa-tenggara-barat.html>. Di akses pada 25 Mei 2016.

langsung pula menjiwai rakyatnya, bercita-cita luhur dan suci serta tindak tanduk baik rokhaniah maupun jasmaniah berdasarkan kesucian.

4. Kuning : kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian itu maka membawa kita pada kejayaan.
5. Hitam : abadi, kejayaan yang bersdasarkan atas landasan yang luhur akan abadi.
6. Merah : keberanian, kepahlawanan, berjiwa hidup dan dinamis untuk menegaskan kebenaran dan keadilan.

2. Letak Geografis Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.321,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 Km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 Km² (76,49%) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' bujur timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Flores
2. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
3. Sebelah Barat : Selat Lombok
4. Sebelah Timur : Selat Sape

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa adalah Kabupaten yang paling luas wilayahnya, yaitu 875.231 Ha dan memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 kecamatan, sedangkan Kabupaten/Kota yang paling sedikit wilayahnya adalah Kota Mataram yaitu ; 6.130 Ha. Kabupaten/Kota yang paling banyak wilayah administrasi Desa/Kelurahan adalah Lombok Timur yaitu 254 Desa/Kelurahan dengan jumlah Kecamatan sebanyak 20 kecamatan. Berikut ini Peta Administrasi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

Gambar 2.

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat



Provinsi Nusa Tenggara Barat sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta sumber daya alam yang kaya dan lapangan investasi yang banyak. Provinsi Nusa Tenggara Barat jelas akan mampu menciptakan lingkungan investasi yang baik supaya dapat menarik sekamin banyak perusahaan dari beberapa negara maupaun pengusaha swasta, tidak terkecuali negara Tiongkok untuk dapat menanamkan modal atau investasi. Sektor pertanian dan perikanan merupakan peluang yang besar bagi kerjasama antara provinsi Zhejiang

dan provinsi NTB disamping sektor pariwisata, perhubungan, perindustrian dan perdagangan termasuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan serta di kawasan ekonomi khusus (KEK). Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menyimpan keanekaragaman sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan, lahan sawah, perkebunan daerah, pertambangan, kelautan dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat yang masih belum terjamah oleh berbagai investor.

Potensi sumber daya alam NTB yang besar dalam perekonomian juga harus berimbang pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan industri rakyat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK). IMK sendiri mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil, maka usaha IMK dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. IMK tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat tanggap menangkap peluang untuk substitusi impor dan meningkatkan (*supply*) persediaan domestik.

Pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah khususnya provinsi NTB juga bisa di gunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hirarki suatu kota yang besar akan mempercepat

wilayah lain untuk berkembang. Hirarki kota provinsi dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan.

Adapun lahan investasi yang juga berpotensi dan berkembang di provinsi Nusa Tenggara barat selain disektor pertanian, perikanan, kelautan serta pariwisata, yaitu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),² yang merupakan kawasan dengan batas tertentu yang mencakup dalam wilayah hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Provinsi NTB diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing nasional dan internasional berbasis pengembangan industri MICE (*Meeting, incentive, convention, exhibition*), serta pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, dan tembaga, sesuai RKP 2016 pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB meliputi persiapan perasional KEK Mandalika dan pembangunan kawasan penggerak ekonomi di Kawasan Bima.

Penetapan wilayah mandalika sebagai KEK dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat serta juga untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Wilayah Mandalika memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan

²Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015, dalam, http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015_ok.pdf. Di akses dan di download pada tanggal 28 juni 2016.

geoekonomi wilayah Mandalika memiliki objek wisata bahari yang merupakan pantai yang berpasir putih dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan pulau Bali. Sedangkan keunggulan geostrategis wilayah Mandalika adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan Bandar Udara International Lombok.

Tabel 2.1

Manfaat Pengembangan KEK Mandalika NTB

No	Uraian	Tanpa Pengembangan Mandalika	Dengan Pengembangan Mandalika
1.	Manfaat langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari dampak negatif pada pariwisata - Daya tarik utama yang menjadi minat khusus tujuan wisatawan adalah tradisi masyarakat dan keindahan alam Lombok - Memelihara sumberdaya alam dan keunikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghidupkan kembali pasar lokal - Memperbaiki produktivitas - Menyediakan kesempatan tenaga kerja
2.	Manfaat tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat bebas untuk menikmati alam karena tidak ada penghalang - Tingkat kriminalitas rendah - Dapat digunakan sebagai lahan percepatan ekonomi dengan fokus pada penangkapan ikan (memancing) atau pertanian yang beradaptasi dengan struktur tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal - Meningkatkan perekonomian nasional - Menarik investasi luar negeri dan pengembangan teknologi melalui pengembangan investasi dan ekspor

Sumber: PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) – BTDC/ITDC, 2015

KEK Mandalika memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, antara lain Pantai Kuta, Pantai Serenting, Tanjung Aan, Pantai Keliuw, dan Pantai Gerupuk. Selain itu, KEK Mandalika bisa disinggahi kapal pesiar. Kelebihan laut di pantai selatan ini adalah memiliki kedalaman laut yang sangat bagus, sehingga sangat tepat bagi kapal pesiar. Pengembangan KEK Mandalika akan membawa manfaat relatif besar bagi perekonomian daerah. Manfaat yang bisa dirasakan secara

langsung adalah dapat menghidupkan pasar lokal, memperbaiki produktivitas dan menyediakan kesempatan tenaga kerja. Sedangkan manfaat tidak langsung dari pengembangan KEK Mandalika adalah dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, meningkatkan perekonomian nasional, dan menarik investasi luar negeri dan pengembangan teknologi melalui pengembangan investasi dan ekspor terkhusus provinsi Zhejiang yang telah melakukan kerjasama *Sister Province* dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat berpeluang dalam investasi ini dimana pertimbangan pemerintah provinsi NTB bahwa saat ini sangat membutuhkan investasi di berbagai bidang baik itu, pendidikan, pariwisata, perikanan dan kelautan serta pengembangan KEK tersebut.

B. Dinamika Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT

Provinsi Zhejiang adalah provinsi di Republik Rakyat Tiongkok yang terletak pada bagian timur Negara Republik Rakyat Tiongkok yang mana ibu kota dari provinsi Zhejiang adalah Hangzhou yang juga terletak pada pesisir timur Provinsi Zhejiang. Pada tahun 2003, luas wilayah di provinsi Zhejiang adalah 101.800 km² dan kepadatan penduduknya kurang lebih berjumlah 46.800.000 jiwa, yang sebagian besar masyarakat di provinsi Zhejiang berprofesi sebagai petani, perkebunan serta nelayan sebagai mata pencaharian.³ Provinsi Zhejiang juga merupakan provinsi yang saat ini dijadikan sebagai provinsi percontohan produk kelautan serta pusat perdagangan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

³ Provinsi Zhejiang Republik Rakyat Tiongkok. Dalam <http://english.zj.gov.cn/col/col111/index.html>. Diakses pada 27 Mei 2016.

Gambar 3.

Peta Provinsi Zhejiang RRT.



Sebagaimana kita ketahui bahwa, Negara Tiongkok menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan peningkatan pengaruh politik dalam berbagai bentuk institusi internasional. Transformasi Tiongkok yang pada awalnya menjalankan praktik isolasionisme menjadi politik terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai perkembangan tersebut menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi yang perlu di perhitungkan di dunia internasional. Berbagai perubahan yang dilakukan di beberapa sisi oleh pemerintah Tiongkok, baik itu perubahan yang sifatnya domestik maupun perubahan dengan melibatkan sistem

internasional.⁴ Pada sisi internasional, Tiongkok menjalin hubungan baik dengan dunia internasional, terutama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menjamin terciptanya lingkungan yang idusif bagi pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Pada sisi domestik, peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik menjadi fokus utama politik luar negeri Tiongkok. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan ekonomi wilayah negara baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sistem pemerintah Tiongkok yang *notabene* adalah negara komunis, sering digambarkan secara tidak tepat oleh media barat sebagai sistem negara yang tertutup dan jauh dari pergaulan dunia. Ilustrasi seperti itu sama sekali tidak benar, sebab dalam sistem pemerintahan Tiongkok yang republik-presidensial ini, menganut sistem otonomi daerah atau desentralisasi yang fleksibel dan terbuka untuk kerjasama ekonomi maupun ilmu pengetahuan dengan pemerintahan regional dari luar Tiongkok.⁵ Tiongkok yang memiliki bentuk negara kesatuan memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi mereka yang berjumlah kurang lebih 23 provinsi untuk melakukan kontak dan hubungan kerjasama dengan provinsi asing dengan pengetahuan lembaga legislatif mereka.

Provinsi Zhejiang merupakan provinsi dengan pendapatan perkapita terbesar di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bahwasanya provinsi ini yang pertama kali mencapai GDP diatas USD 3.000 pada tahun 2011, perkembangan saat ini Nominal GDP telah

⁴ Koesmawan. (2002). *“Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke Cina: Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-Cina”*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, No. 2, Jilid 7.

⁵ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomasi : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press. Yogyakarta. Hal. 54-55.

mencapai sekitar USD 400 Milyar lebih yang berarti hampir mendekati 7-% dari PDB (*Produk Domestik Bruto*) di Indonesia. Provinsi Zhejiang merupakan provinsi yang saat ini dijadikan sebagai provinsi percontohan produk kelautan serta pusat perdagangan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita penduduk di provinsi Zhejiang adalah yang tertinggi di China. PDB perkapita Indonesia pada tahun 2014 masih sekitar Rp. 41,81 Juta atau 3.531,45 dollar AS. Sementara provinsi Zhejiang telah mencapai 15.000 dollar AS. Jika dibandingkan dengan provinsi NTB, PDB per kapitanya pada tahun 2014 masih sekitar 17, 27 Juta rupiah atau sekitar 1.439 dollar AS. Dengan demikian tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di salah satu wilayah provinsi di Tiongkok yang membuat Tiongkok terdorong untuk melakukan investasi di negara-negara berkembang seperti negara kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan di negara Republik Indonesia pada khususnya terutama di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara terus menguat baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Tantangan ekonomi yang dihadapi ASEAN, dimana tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang membuat Tiongkok terdorong untuk melakukan investasi di negara-negara berkembang seperti negara kawasan Asia Tenggara. Masa depan keamanan kawasan Asia Tenggara akan terbentuk oleh beberapa faktor politik dan ekonomi yang saling mempengaruhi, salah satunya ialah evolusi ekonomi Asia Tenggara; pembangunan ekonomi dan politik Tiongkok, serta interaksi dengan Asia Tenggara. Salah satu bukti pertumbuhan ekonomi Tiongkok ialah dengan berkembang

pesatnya pembangunan di berbagai tempat serta semakin berkembangnya beberapa provinsi di Tiongkok, yang mana salah satunya adalah provinsi Zhejiang.

C. Sister Province

Sejak memasuki abad 20, Hubungan internasional semakin berkembang dan telah mengalami banyak perubahan, serta semakin kompleks dan berkembangnya jenis-jenis kerjasama seperti *Sister Province* atau lebih dikenal dengan sebutan *Sister City*. Hal demikian didasarkan oleh tingkat hubungan yang memenuhi kepentingan nasional suatu negara dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nasional setiap negara tersebut salah satunya dengan kerjasama baik kerjasama antar negara maupun antar kelompok serta NGO serta MNCs. Tetapi kerjasama tersebut tidak hanya dilakukan antar negara, organisasi maupun kelompok namun juga antar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Negara yang berbeda.⁶

Pada awalnya kerjasama *Sister City* ataupun *Sister Province* berasal dari kerjasama antar kota di berbagai negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Ide awal *Sister City* dicetuskan pertama kali pada tahun 1956 oleh Presiden Amerika Serikat ke 34, Dwight Eisenhower.⁷ Pada mulanya penerapan konsep ini adalah sebagai sarana diplomasi politik negara ditingkat regional dan internasional. Pengimplementasiannya menjadi pendorong bagi

⁶ Frankel, J. Hubungan Internasional. Sungguh Bersaudara Press. Jakarta 1980.

⁷ "Ide awal dicetuskannya *sister city* oleh presiden Amerika Serikat". *Sister Cities Internasional*. Tersedia di <http://www.sistercities.org/about-sister-cities-international>. Di akses tanggal 15 April 2016.

rakyat untuk menjalin persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, baik antar elemen masyarakat, kota, antar pemerintah lokal dan pusat maupun antar negara diseluruh dunia.

Jalinan kerjasama ini dilakukan atas dasar kepentingan pengelolaan provinsi dan kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Istilah lain dari Provinsi Bersaudara (*Sister Province*) adalah kota bersaudara (*Sister City*), kota kembar (*Twinning city*), kota bersahabat (*Friendship City*) dan kota mitra (*partner towns*). Kosep kota kembar (*Twining City*) dimulai di Eropa sesudah perang dunia II dengan maksud menciptakan saling pengertian antara penduduk kota yang berbeda dan mempromosikan proyek lintas batas untuk kemakmuran bersama. Sedangkan menurut organisasi Sister City Internasional, Sister City merupakan program kerjasama antar daerah, kota atau suatu temoat dengan kedudukan Pemerintah pada suatu Negara dengan Daerah lain yang sama kedudukannya di luar negeri yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik yang sama dan kemudian disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.

Pemakaian istilah *sister province/sister city* juga memiliki banyak penyebutan atau perbedaan penyebutan di beberapa negara didunia seperti di Moskow (russia) yang hanya menyandingkan istilah *Sister City* dengan kota-kota bekas negara-negara pecahan Uni Soviet. Hal ini menurut negara-negara tersebutm terminologi *sister city* hanya boleh di digunakan untuk kerjasama antar dua kota yang sebelumnya memiliki hubungan darah (hertage) atau hubungan emosional yang kuat. Sehingga istilah lain yang diberlakukan selain istilah *sister city* adalah *partnership city*, *friendship city*, *twin city*, *jumelage*, *partnerstald*. Terkhusus menyangkut penamaan dan penggunaan istilah

sister city di Indonesia oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/POUD resmi menggunakan istilah sister city dan sister province dalam menyebut bentuk-bentuk kerjasama antar kota-kota di Indonesia baik itu dalam ranah lokal maupun internasional. Istilah tersebut resmi dikeluarkan oleh kementerian terkait yakni Kementrian Luar Negeri berkejasama dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan kedepannya. Dilain sisi, hal tersebut menjadi simbol, kontrol serta pengawasan dibawah kendali Pemerintah Pusat yang memantau kerjasama-kerjasama Internasional yang dilakukan daerah-daerah di Indonesia.

Kerjasama *sister province/city* di Indonesia mulai dirintis pertama kalinya seiring dengan berkembangnya konsep sister city di Amerika Serikat pada decade 1960-an. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Piagam Persaudaraan pada tanggal 2 juni 1960 antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig (Jerman). Dimana hal ini menjadi titik tolak munculnya berbagai Perjanjian Kerjasama *Sister Province/Sister City* di berbagai kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di berbagai negara didunia. Munculnya Kota Bandung sebagai Kota perintis dimulainya kerjasama internasional sister city di Indonesia, menjadikan kota-kota lain di Indonesia termotivasi untuk ikut ambil bagian dalam menjali kerjasama internasional dengan kota-kota lain di dunia. Dengan keikutsertaan kota-kota lain ditiap-tiap provinsi menambah daftar panjang kerjasama internasional yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah daerah/kota serta mengisi daftar perjanjian internasional dalam treaty room departemen luar negeri.

Dilihat dari dinamika di Indonesia, Permendagri Nomor 1 tahun 1992, disebutkan bahwa hubungan kerjasama sister city/province adalah hubungan kerjasama kota/ provinsi bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dengan kota atau provinsi setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.

Provinsi kembar atau *Sister Province* adalah hubungan kerjasama “Provinsi bersaudara” yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah setingkat di luar negeri.⁸ Sedangkan jika kita melihat awal kerjasama *sister city/province* dimana Kota kembar mulai dijalin pada tahun 1836 di Jerman. Tahun 1905 terjalin hubungan antara kota Keighley, West Yorkshire di Inggris dengan kota Suresnes dan Puteaux di Prancis. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Hubungan kota bersaudara atau provinsi bersaudara sangat bermanfaat bagi pendidikan (pertukaran pelajar/mahasiswa) dan kerjasama budaya serta ekonomi dan perdagangan. Perkembangan dan kepentingan dari masing-masing kota yang menjalin hubungan kerjasama kota bersaudara, saat ini semakin berkembang, terutama menyangkut hal yang menjadi kepentingan bersama seperti isu lingkungan (environment) dan energi.

⁸ Sidik Jatmika, 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 107

Tahapan dalam proses hubungan kerjasama *Sister Province*, yaitu, *Pertama*, bahwa kerjasama tersebut dipererat dengan penandatanganan perjanjian formal yang dikenal dengan MoU, dimana hal ini dilakukan oleh pemimpin provinsi/kota atau pejabat setempat yang ditunjuk. *Kedua*, perjanjian kerjasama yang ditandatangani tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas. *Ketiga*, oleh karena perjanjian tersebut sedang berjalan dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, rencana kerjasama dengan berbagai aspek yang telah disepakati harus disebarluaskan. *Keempat*, peran serta pejabat atau pimpinan kota/provonsi sangat penting, tetapi perlu juga ditunjang dengan partisipasi masyarakat. *Kelima*, kerjasama *Sister Province* ini akan membawa dampak besar terhadap berbagai perubahan yang positif, harus menjadi karakter suatu negara sehingga aparat pemerintah besungguh-sungguh dan memiliki andil besar dalam kerjasama tersebut.⁹ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor; 193/1652/PUOD/1993 tertanggal 26 april 1993, pembentukan kerjasama *Sister Province* dan *Sister City* harus didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut.¹⁰

1. Adanya kesamaan kedudukan atas status administrasi,
2. Adanya kesamaan besaran dan fungsi,
3. Adanya kesamaan karakteristik,
4. Adanya kesamaan permasalahan,

⁹ Dikutif dari tesis Ika Ariani Kartini, 2012, Penerapan prinsip public good governance dalam hubungan internasional melalui perjanjian sister city (studi kasus sister city kota Bandung), Magister Ilmu Hukum, UGM, hal. 14. Dalam Tesis Stivani Iswara Sinambela, 2014, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang." Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal. 39

¹⁰ Sidik Jatmika, *Op. Cit*, hal 113.

5. Adanya ilmu dan teknologi yang dapat dialihkan,
6. Adanya komplementaritas antara kedua belah pihak dalam bidang ekonomi, sehingga dapat menimbulkan aliran barang antara kedua belah pihak.

Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi kerjasama *Sister City/Province* terbagi menjadi :

1. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota dalam Hubungan Internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan
2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/delegasi dari suatu kota/provinsi terhadap kota/provinsi lainnya yang ditunjuk untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.
3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditujukan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dengan pengembangan yang dalam hal ini dapat ditujukan pembangunan kota/provinsi yang lebih baik.
4. Ekonomi, merupakan bidang yang sangat penting dalam kerjasama *Sister City/Sister Province*, dimana hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar

kota maupun provinsi sehingga konteks kerjasama tejalin lebih harmonis.¹¹

Dengan diberkakukanya Undang-undang No. 22 tahun 1999, maka pemerintah daerah dapat melakukan hubungan luar negeri, yang sekarang diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 yang dimana berisikan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, yang sebelumnya juga diatur oleh Undang-undang no. 32 tahun 2004 yang berisikan perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mana undang-undang ini masih dalam penyesuaian yang kemudian pada amandemen 2014 menjadi pelimpahan kewenangan terhadap daerah.¹²

Terkait dalam hal yang menyangkut penyebutan atau penggunaan istilah *sister city* di Indonesia oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/POUD resmi menggunakan istilah *sister province* dan *sister city* dalam menyebut bentuk-bentuk kerjasama antar kota-kota di Indonesia baik itu dalam ranah lokal maupun internasional. Istilah tersebut resmi dikeluarkan oleh kementrian terkait yakni Kementrian Luar Negeri berkejasama dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan kedepannya. Dilain sisi, hal tersebut menjadi simbol dan kontrol serta pengawasan dibawah kendali

¹¹ Donald Bell-Souder and Shanna Bredel, 2005, A Study Of Sister City Relations, Professor Laurel Rasplica Rodd, dalam tesis Stivani Iswara Sinambela, 2014, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang." Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal. 40.

¹² Undang-Undang No. 23. Tahun 2014, Tentang Pelimpahan Kewenangan Terhadap Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan provinsi lain, baik lokal maupun transnasional di daerah otonom.

Pemerintah Pusat yang memantau kerjasama-kerjasama Internasional yang dilakukan daerah-daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, hubungan kerjasama kota kembar (*Sister City*) atau Provinsi kembar (*Sister Province*) mempunyai arti yang strategis karena bertemunya pusat pertumbuhan dan perkembangan Provinsi/kota dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama *Sister City* sudah sesuai dengan Hukum Internasional (Konvensi Wina 1963 dan Konvensi Wina 1969), Hukum Nasional (UU No. 22 Tahun 1999, UU 37 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2000, dan UU. No. 20 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. SK. 03/AIOTIX/2003).¹³

D. Alasan Membangun Kerjasama Sister Province

Memasuki perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak terbatas, serta dalam pemenuhan kebutuhan nasional suatu negara, diplomasi merupakan perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri di semua tingkat dari yang teratas sampai yang terbawah. Kekuatan nasional adalah bahan baku yang menentukan bentuk kekuatan negara, kualitas diplomasi suatu negara menggabungkan faktor-faktor yang berlainan itu menjadi satu keseluruhan yang terpadu, memberikan arah dan memberikan nafas kekuatan yang riil. Singkatnya diplomasi adalah otak kekuatan nasional sedangkan moral nasional adalah jiwannya.

Kerjasama *Sister Province* ini diawali dengan adanya kebijakan pemerintah Tiongkok untuk memperluas serta menjajaki beberapa provinsi di Indonesia khususnya provinsi Nusa Tenggara Barat yang

¹³ S. H Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, KATA, Surakarta. 2005.

pada tahun 2015 kedua provinsi menyepakati kerjasama *Sister Province* (provinsi kembar) antara provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan provinsi Zhejiang Tiongkok yang pada sebelumnya Provinsi Zhejiang sudah menjalin MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan beberapa provinsi di Indonesia, seperti Provinsi Banten pada tahun 2010, juga provinsi Jawa Barat sepakat menjalin kerjasama sejak tahun 2013, kemudian Provinsi Bali dan NTT sudah menandatangani MoU dan sudah ditindaklanjuti dengan kesepakatan teknis dalam investasi. Bahkan provinsi Jawa Timur sudah membahas bidang yang dikerjasamakan sejak tahun 2012 lalu dengan kedatangan pemerintah Provinsi Zhejiang bersama kedua DPRD-nya, Mrs Qiao Chuanxiu ke Jawa Timur. Secara lebih lanjut Jawa Timur sendiri lebih memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan industri. Jawa Timur itu sendiri berkepentingan meniru keberhasilan provinsi Zhejiang dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya agar bisa mencapai 15.000 dollar AS. Maka dari itu agar bisa meniru keberhasilan provinsi Zhejiang, Jawa Timur terus mengirim sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) ke Provinsi Zhejiang untuk ditugaskan mempelajari keberhasilan Provinsi Zhejiang.

Dalam hal ini provinsi Nusa Tenggara Barat juga membangun hubungan kerjasama dengan provinsi Zhejiang Tiongkok bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar pemerintah provinsi serta membangun peningkatan kerjasama dalam berbagai sektor. Nusa Tenggara Barat (NTB) sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta sumber daya alam yang kaya dan lapangan investasi yang banyak. Nusa Tenggara Barat akan mampu menciptakan lingkungan investasi yang baik supaya dapat menarik semakin banyak

perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal atau investasi. Sektor pertanian dan perikanan merupakan peluang yang besar bagi kerjasama antara provinsi Zhejiang dan provinsi NTB disamping sektor pariwisata, perhubungan, perindustrian dan perdagangan termasuk kerjasama pendidikan serta kebudayaan.

Pada awalnya program *Sister Province* atau *Sister City* ini biasanya dilakukan antar kota di negara maju di Amerika atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi, antara kota yang bekerjasama. Meskipun akhirnya muncul *Sister City* antara kota negara maju dengan kota negara berkembang. Keuntungan yang didapatkan dengan melaksanakan kerjasama perjanjian *Sister Province* antara lain¹⁴ :

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat pesahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak,
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah. Meski demikian, hubungan kerjasama sister province juga menimbulkan

¹⁴ Andi Oetomo, (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung), Bulletin Penataan Ruang. Hal. 1. Dalam Tesis Ika Ariani Kartini, 2012, *Penerapan prinsip public good governance dalam hubungan internasional melalui perjanjian sister city (studi kasus sister city kota Bandung)*, Magister Ilmu Hukum, UGM, hal. 14

faktor negatif diantaranya terjadinya beban keuangan negara atau daerah, menunggu fasilitasi pihak pemerintah, munculnya ketidaksetaraan, bidang kerjasama yang kurang seimbang dari aspek permodalan sehingga menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam rangka pelaksanaan amanat MPR, telah di undang dua undang, masing-masing undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang –undang no. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kwenangan pemeintah dan kwenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Pembentukan kerjasama *Sister Province* atau provinsi kembar ini diatur dalam pasal 5 permendagri Nomor 03 Tahun 2008. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika daerah yang hendak mengadakan kerjasama *Sister Province/Sister City* dengan daerah lain, baik internal maupaun lintas negara, maka harus memperhatikan syarat similaritas. Sebagaimana tercantum dalam diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undang-undang No. 2 Tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Selain itu, dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri no. 3 tahun 2008, berikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama sister province/sister city, pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan :

1. Hubungan diplomatik. Daerah yang diajak membangun kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan negara Indonesia.

2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian yang merupakan urusan pemerintah daerah.
3. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *Sister Province/city* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah yang terlibat.
4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Kerjasama *Sister Province/City* tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

Oleh sebab itu perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan hubungannya dengan *Sister Province*, karena dianggap lebih menguntungkan maka *Sister Province* ini di anggap bisa menambah potensi daerah masing-masing di Indonesia.

Gambar 4.

Gubernur NTB berdiskusi dengan Mr. Liu (*Deputy Director General Departement of International Economic Affairs*) di Beijing



Kementerian Luar Negeri RRT. Gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi berdialog dengan Deputy Director General Departement of International Economic Affairs Kementerian Luar Negeri RRT Liu Jingsong (Mr. Liu) di Beijing (8/6).

Terjalinnnya kerjasama *Sister Province* antara kedua provinsi ini bermula atas dasar provinsi Nusa Tenggara Barat di undang untuk berkunjung ke Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) oleh pemerintah Zhejiang Tiongkok, dimana dalam undangan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Barat, DR. KH. Zainul Majdi, MA, memimpin delegasi Provinsi NTB dalam melakukan kunjungan kerja ke provinsi Zhejiang Tiongkok, yang dalam hal ini dilakasakan untuk memenuhi undangan *Consulate General of the People's Republic of Tiongkok* di Denpasar untuk menjajaki peluang investasi dan kerjasama antara Indonesia (Provinsi NTB) dan RRT (provinsi Zhejiang). Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB di terima atau disambut oleh *Deputy Director General Departement of International Economic Affairs* (CPIFA) yang dimana selanjutnya gubernur berdiskusi dan membahas peluang kerjasama dengan sejumlah pejabat pemerintah

provinsi Zhejiang di Hangzhou untuk memperjelas kaitan kerjasama *Sister Province* antar kedua provinsi.

Gambar 5.

Gubernur NTB saat memimpin delegasi berkunjung ke RRT untuk jajaki kerjasama *Sister Province*.



Jajaki *Sister Province* antara NTB dengan Provinsi Zhejiang.
Gubernur NTB (Dr. TGH M. Zainul Majdi), Wakil Gubernur Prov Zhejiang, Konjen RRT Denpasar (Mr. Hu Yinquan), dan Pejabat Pemprov Zhejiang (Mr. Yu Xi Hua) Di Hangzhou (9/6).

Mou (*Memorandum of Understanding*) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mitranya Provinsi Zhejiang Tiongkok merupakan hal yang penting dalam sebuah kerjasama antar provinsi atau *sister province*. Dimana dalam hal ini dilakukannya kesepakatan kerjasama serta penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) yang pada kesempatan tersebut di laksanakan di Tiongkok oleh Ridwansyah M. Yakub selaku kepala BKPM NTB atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga oleh Yu Xi Hua atas nama Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok dan disaksikan oleh delegasi, baik delegasi

dari pemerintah provinsi NTB maupun dari pemerintah provinsi Zhejiang di Ningbo Marirriot Hotel di Tiongkok.¹⁵

Gambar 6.

Penandatanganan MoU kerjasama *Sister Province* antar kedua Provinsi



Penandatanganan MoU. Mr. Ridwansyah (atas nama Pemrov NTB) dan Mr. Yu Xi Hua (atas nama Pemrov Zhejiang) disaksikan delegasi NTB dan pejabat Pemrov Zhejiang usai penandatanganan MoU antara Pemrov NTB dengan Pemrov Zhejiang di Ningbo Marriott Hotel (14/6).

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama *Sister Province* antara provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Zhejiang adalah terbukanya hubungan internasional provinsi NTB dan terjalannya tukar menukar informasi, ide, pengetahuan dan budaya. Hal ini sangat diperlukan untuk memperluas wawasan bagi masyarakat provinsi NTB khususnya bagi aparat pemerintah provinsi NTB. Pihak-pihak yang dapat menikmati manfaat dari pelaksanaan kerjasama *sister province* adalah kalangan pemerintah provinsi NTB. Baik pada program tukar menukar informasi baik dari sektor investasi, di sektor pariwisata dan pertanian samapai pada sektor pembangunan yang

¹⁵ Penandatanganan MoU (*Memmorandum of Understanding*) antara Provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang Tiongkok yang di lakukan oleh Ridwansyah M. Yakub selaku kepala BKPM (badan Koordinasi Penanaman Modal NTB) atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan Mr. Yu Xi Hua atas nama Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok di Ningbi Marriot Hotel pada tanggal 14 Juni 2015.

diharapkan mampu memberi manfaat yang cukup penting bagi pemerintah provinsi.

Sedangkan pemerintah provinsi Zhejiang selalu melihat suatu kemanfaatan *sister province* dalam strategi jangka panjang dengan melakukan investasi di berbagai sektor. Meskipun ada beberapa bidang atau kerjasama yang relatif tidak aktif atau kurang memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan kota, mereka tidak serta merta menilai kerjasama tersebut gagal atau tidak bermanfaat dimana dalam hal ini diyakini bahwa setiap kerjasama yang dilakukan pasti akan mendatangkan manfaat apabila hal itu tidak terlihat dalam jangka panjang dan pasti akan muncul dalam jangka panjang.

Pemerintah Povinsi Zhejiang RRT berharap dalam kerjasama ini terjadi kerjasama yang nyata antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang RRT berdasarkan kesamaan potensi yang dimiliki. Pihak Provinsi Zhejiang RRT melalui *Consulate General of the People's Republic of Tiongkok* di Denpasar berharap agar pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melakukan promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok).

Program kerjasama *Sister Province* antara provinsi NTB dengan provinsi Zhejiang juga diperlukan untuk perbandingan dalam banyak hal, dimana jalinan kerjasama itu bisa dimanfaatkan untuk melihat kemajuan provinsi lain yang kemudian diadaptasikan dengan kondisi objektif provinsi NTB. Di sisi lain, prinsip dasar kerjasama dalam hal ini *Sister Province* antara lain yaitu menumbuh kembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa.

Mengutamakan prinsip kesetaraan yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antara masyarakat kedua daerah. Saling menghormati kedaulatan kedua negara serta tidak saling mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian dalam negeri masing-masing, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Fokus Bidang Kerjasama Sister Province

Dalam hal hubungan kerjasama yang dilakukan baik oleh Negara dalam hal ini pemerintah negara, pihak swasta serata pihak pemerintah provinsi dan kota jelas memiliki bidang kerjasama yang disesuaikan untuk di fokuskan dalam kerjasama tersebut. Hubungan kerjasama *Sister Province* dua provinsi yang bekerjasama tidak terlepas dari tujuan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemajuan provinsi dan pembangunan. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara pihak yang berkementingan, baik itu pertukaran informasi, pendidikan maupun budaya. Secara lebih rinci bidang kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Provinsi Zhejiang sebagai berikut.

1. Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat dan berkembang, sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur merupakan bagian dari hal penting terutama infrastruktur akses jalan. Perkembangan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya di NTB. Dimana saat ini

pemrov NTB terus melakukan pembenahan dan peningkatan terhadap Infrastruktur di segala bidang. Adapaun tiga bidang Infrastruktur utama yang membuat para investor tertarik untuk berinvestasi khususnya di bidang property, yaitu pembangunan jalan di beberapa daerah, pembangunan hotel dan yang paling penting adalah peningkatan bangunan Bandara Internasional Lombok (BIL).

2. Pertanian

Sebgaimana provinsi-provinsi lain di kawasan timur Indonesia pada umumnya yang berbasis pertanian dalam arti seluas-luasnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menempatkan sektor pertanian sebagai andalan utama pembangunan daerah serta wadah mata pencaharian masyarakatnya. Ditempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan, disamping pariwisata, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan lain-lain, didasarkan pada kenyataan bahwa NTB memiliki potensi pertanian yang dihandalkan, baik besaran potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Sejak tahun 1980-an Nusa Tenggara Barat telah berhasil merubah status dari daerah minus atau rawan pangan menjadi daerah swasembada beras melalui sistem pertanian Gogoh Rancah dan kini telah menjadi salah satu provinsi super fokus kegiatan program peningkatan produksi beras nasional.

Bumi gora adalah sebutan lain dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) karena melalui sistem gora itulah daerah ini mampu merubah lahan tandus atau lahan kering menjadi lahan produktif, sehingga tidak saja berhasil memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lokal, melainkan juga mampu menyuplai kebutuhan daerah-daerah tetangga. Bahkan beberapa tahun terakhir ini sebagai lumbung beras nasional. Dengan demikian kebutuhan akan pangan bisa terpenuhi.

3. Pertambangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki kawasan industri pertambangan yang cukup banyak di karenakan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah PT. Newmont yang merupakan perusahaan tambang emas pertama yang masuk dalam DJSI World ini pada tahun 2007 dan untuk DJSI North America Index, Newmont masuk daftar setiap tahun. Selain masuk dalam jajaran terdepan di sektor industri pertambangan di provinsi NTB, Newmont memperoleh nilai tertinggi di beberapa bidang seperti strategi iklim; sistem manajemen atau kebijakan lingkungan hidup, kwanegaraan perusahaan dan filantropi, ketenagakerjaan serta hak asasi manusia.

Keberadaan Newmont telah membawa dampak positif bagi perkembangan prekonomian provinsi NTB walaupun juga terdapat sisi negatif. Keberadaan industri tambang ini terletak di Sumbawa barat. Newmont merupakan salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Kehadiran

perusahaan tambang tersebut juga memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian di daerah dan sebagian besar masyarakat sudah menikmati hasilnya, karena kehadiran industri tambang di NTB kedepan di harapkan semakin meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu masih banyak sektor industri pertambangan sebagai lahan investasi dan pengembangan sumber daya alam serta pemanfaatan sumber daya manusia.

4. Kelautan dan Perikanan

Kerjasama di sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor kerjasama yang sangat tepat karena di provinsi NTB serta provinsi Zhejiang sama-sama memiliki kesamaan masyarakat dengan bermata pencaharian dari kelautan serta perikanan. di provinsi NTB sendiri pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sarana pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan. Kondisi Provinsi NTB sebagai daerah kepulauan menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di NTB. Di Provinsi NTB belum terdapat rencana pembangunan pelabuhan dalam aitannya dengan pengembangan pelabuhan untuk tol laut. Untuk pembangunan dermaga sesuai sasaran pembangunan dalam RKP 2016 dilakukan di 4 lokasi, meliputi Kayangan, Sape, Pototano, dan Lembar. Inilah yang kemudian bisa dijadikan tempat untuk berinvestasi bagi setiap yang berkepentingan terkhusus Negara

Tiongkok melalui kerjasama *Sister Province* yang sedang terjalin antara Provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang.

5. Kebudayaan dan Pariwisata :

Kerjasama kebudayaan dan pariwisata ini meliputi partisipasi bersama dalam acara budaya dan festival, serta bursa sektor wisata. Sebagai provinsi yang beragam dan berbudaya, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai bermacam-macam kebudayaan, baik itu dalam hal seni tari, kerajinan tangan, pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, alat musik daerah, upacara adat, makanan khas daerah sampai obyek wisata. Terlihat jelas kerjasama dalam bidang budaya pada saat terlaksannaya Silaturahmi Perayaan Budaya Imlek 2016 di Kota Mataram atau ibu kota Provinsi NTB.

Pada awal tahun 2016 tepatnya pada tanggal 20 februari 2016 provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipercaya sebagai lokasi perayaan “Budaya” Imlek 2016. Acara ini merupakan gagasan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui kedutaan Besar di Indonesia khususnya Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar yang membawahi Bali, NTB dan NTT.

Dalam kesempatan tersebut, Konsulat Jenderal Tiongkok Mr. Hu Yinquan yang pada saat itu didampingi wakil Konjen dan beberapa staf mengungkapkan rasa apresiasi yang juga meupakan bentuk dan niat baik pemerintah NTB untuk melanjutkan kerjasama yang selama ini sudah dirintis dan berjalan “saya harap perayaan imlek bersama bisa sebagai

bentuk harmonisasi sebagai bagian bangsa di dunia sekaligus mempromosikan Budaya Tiongkok khususnya budaya Imlek.¹⁶

Sementara itu kepala Biro Kerjasama dan SDA, Muhammad Rum menilai bahwa kegiatan Imlek bersama yang dilaksanakan di kota Mataram akan semakin mempererat hubungan kerjasama NTB dengan Tiongkok terlebih lagi pada tahun 2015 sudah ditandatangani *Letter of Intent / LoI Sister Province* antara provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang. Seperti diketahui bahwa *Sister Province* dengan pemerintah RRT mencakup beberapa bidang yang oleh karena itu peran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait sangat diharapkan agar kerjasama yang konkrit yang diamanatkan oleh Gubernur NTB dapat terwujud melalui pengajuan proposal atau rencana aksi yang ditunjukkan kepada konjen RRT di Denpasar.

Dalam sektor pariwisata yang telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa diberbagai negara baik itu, negara Thailand, Singapura, Filipina, China (Tiongkok), begitupula provinsi Nusa Tenggara Barat, perkembangan pariwisata di daerah ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan yang demikian pesat itu harus didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai seperti alat transportasi.

¹⁶ Silaturrahim Perayaan BUDAYA IMLEK 2016 di Mataram, dalam, <http://birokerjasama.ntbprov.go.id/silaturrahim-perayaan-budaya-imlek-2016-di-mataram/>. Di akses pada tanggal 25 mei 2016.

Pulau Lombok mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil mendapatkan dua penghargaan dunia dalam ajang International World Best Halal Travel Summit (ajang kompetisi pariwisata halal) di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA).¹⁷ Pulau Lombok berhasil meraih peringkat pertama di 2 kategori yakni, World's Best Halal Honeymoon Destination atau Wisata Bulan Madu Halal terbaik di dunia , dan World's Best Halal Tourism Destination atau tujuan wisata halal terbaik di dunia.¹⁸ Ini merupakan bukti sumber daya alam yang melimpah di negara Indonesia yang juga menjadi daya tarik tersendiri untuk menyedot investasi asing terutama dalam sektor pariwisata.

6. Peningkatan Kapasitas

Dalam bidang kerjasama ini sendiri meliputi berbagai hal seperti pelatihan dan pertukaran pejabat provinsi. Di bidang kapasitas bangunan ini yang secara berkesinambungan dilaksanakan antara Provinsi NTB dan Zhejiang pada program delegasi pejabat pemerintah dari beberapa SKPD untuk mengikuti program studi banding atau kunjungan untuk mengikuti berbagai kegiatan. Program ini sangat memberi manfaat bagi aparat pejabat pemerintah NTB untuk mendapatkan pengalaman dan pengembangan

¹⁷ NTB Sabet 2 Penghargaan Worlds Travel Summit 2015, dalam <http://www.ntbprov.go.id/berita-ntb-sabet-2-penghargaan-worlds-travel-summit-2015.html>, di akses pada tanggal 26 mei 2016.

¹⁸ Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan pada Jumpa Pers dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang diselenggarakan di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata RI Jakarta Pusat Rabu 21 oktober 2015. Dalam perhelatan puncak, The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015 itu penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Indonesia yakni World's Best Family Friendly Hotel yang dimenangkan Sofyan Hotel Betawi Jakarta Menpar menjelaskan, malam penganugrahan atas event yang didukung Abu Dhabi Tourism & Culture Authority ini berlangsung di The Emirates Palace Ball Room Abu Dhabi. Event ini adalah lanjutan dari Global Islamic Economy Summit (GIES) pada bulan November tahun 2013 lalu di Dubai UEA yang disponsori oleh Dubai Chamber.

wawasan dan membina persahabatan antar penjabat pemerintah setingkat dan melakukan tukar menukar informasi untuk menambah pengembangan wawasan dan pengalaman.